# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang layak, kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup masyarakat disuatu negara. Kemiskinan sudah menjadi masalah global, dimana setiap negara memiliki anggota masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan juga berarti ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi (Friedman, 2008).

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun negara dijagat raya ini yang kebal dari kemiskinan. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial-ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Semua negara di dunia ini sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Kemiskinan tidak memilih tempat dimana dia mau hinggap, tidak peduli negara maju ataupun negara berkembang dan tidak peduli diperkotaan ataupun di pedesaan (Suharto, 2009:14).

Indonesia sebagai bagian dari negara dunia ketiga, dalam proses pembangunannya belum pernah bebas dari persoalan kemiskinan. Walaupun secara moral dan konstitusional, bangsa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat agar masyarakat Indonesia dapat hidup layak dari sudut ekonomi, sosial dan politik, sesuai dengan sila kelima dari Pancasila dan Pasal 34 UUD Republik Indonesia masih selalu diwarnai oleh persoalan dan problematika kemiskinan.

Provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tercatat pada tahun 2019 terdapat 27,53 persen dari total populasi. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi Papua Barat yaitu 22,17, NTT 21,09 persen, Maluku 17,69 persen 15,52 persen (BPS, 2021). Provinsi Papua adalah salah satu provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup maksimal dalam bidang pertambangan, sebesar 2,5 miliar ton didalamnya yaitu batuan biji emas dan tembaga yang dapat membantu ekonomi daerah tersebut,semuanya terdapat di wilaya konsensi freport. Sesuai penjelasan sebelumnya seharusnya dapat membantu melancarkan kegiatan ekonomi di provinsi tersebut, namun berbeda dengan kenyatan yang ada, bahwasanya provinsi Papua menjadi provinsi yang paling belakang dan terbanyak angka tingkat kemiskinan di indonesia. Hal tersebut karena dapat dilihat angka kemiskinan di provinsi Papua pada tahun 2019. Sebesar 27,74% dari populasi di Indonesia ada kurang lebih 74 ribu desa atau wilayah. Diantara desa atau wilayah tersebut 18% atau 18.126 desa atau wilaya tertinggal, yang besar di kawasan Indonesia Timur. Ketertinggalan tersebut membuat angka kemiskinan di daerah-daerah tersebut tinggi (BPS, 2018).

Provinsi Papua saat ini memiliki 4,3 juta penduduk, jika 26,8 persennya miskin, berarti ada sekitar 1,15 juta penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Apabila penambahan penduduk semakin bertambah tanpa diiringi peningkatan ekonomi pada level rumah tangga, maka bisa dipastikan jumlah penduduk miskin akan semakin memingkat sehingga upaya Papua untuk lepas dari jerat kemiskinan akan semakin jauh (BKBN PAPUA, 2020).

Pendapatan yang tinggi akan meningkatkan daya beli sehingga dapat mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dan seiring berjalan dengan waktu tingkat kemiskinan akan berangsur-angsur menurun. Hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan di provinsi di Papua sangat tinggi. Tetapi sering berjalan dengan waktu, semakin lama kemiskinan di Papua mengalami penurunan (BPS indonesia 2021). Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di provinsi Papua sebanyak 926,36 ribu jiwa atau sebesar 27.53 persen, sementara di tahun 2020 menurun

menjadi 911,37 ribu jiwa atau 26,64 persen.Meskipun data di Provinsi Papua menunjukan penurunan tetapi provinsi Papua merupakan provinsi

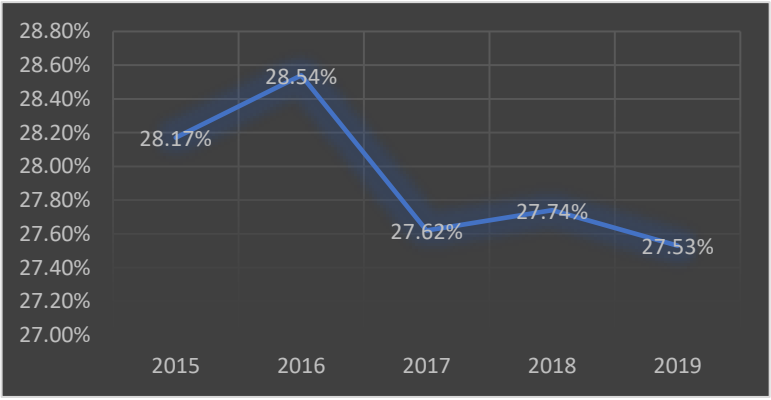


yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Maka program-program kemiskinan dan perhatian lebih dari pemerintah masih sangat di perlukan di provinsi Papua dalam mengatasi masalah-masalah kemiskinan agar semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin.

**Gambar 1.1** Statistik Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir angka kemiskinan di provinsi Papua cendrung menurun, tingginya tingkat kemiskinan di Papua membuat pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap upaya pengentasan kemiskinan. secara nasional provinsi Papua berada pada peringkat pertama sebagai provinsi termiskin di Indonesia pada tahun 2019 (BPS, 2019).

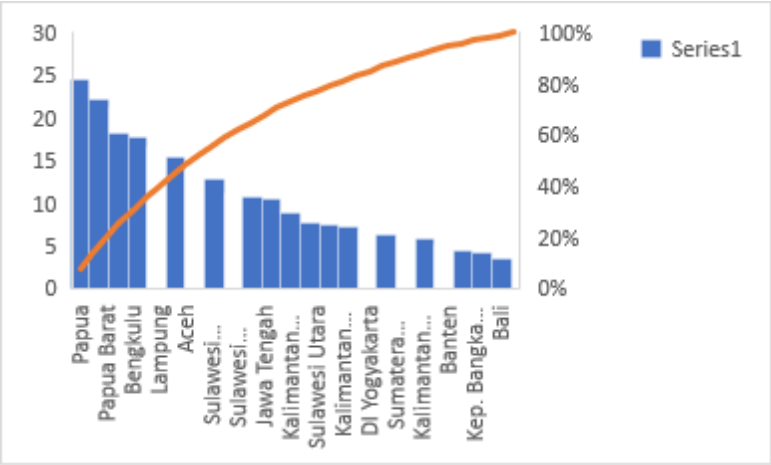


**Gambar 1.2** Persentase Kemiskinan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2019

Berdasarkan gambar 1.2 diatas menunjukan bahwa pada tahun 2019 Papua menduduki peringkat pertama sebagai perovinsi termiskin di indonesia yaitu 27,53% sedangkan provinsi Bali 3.79% berada paling rendah untuk tingkat kemiskinan di Indonesia.

Data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin di Papua lebih fokus di daerah pedesaan dimana pada September 2019 (semester) terdapat 857.020 jiwa atau penduduk miskin di perdesaan mencapai 35.50%, sedangkan presentase penduduk miskin di perkotaan hanya 43930 jiwa atau 4,47%. Oleh karena itu, kebijakan pengetasan kemiskinan perlu dilakukan secara hati-hati. Kebijakan pengentasan kemiskinan di Papua sebaiknya diprioritaskan di kantong-kantong kemiskinan tinggi. Penyebab kemiskinan antar wilayah (perdesaan dan perkotaan) kemungkinan juga berbeda (ada *spatial heterogeneity*) sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, termasuk peningkatan akses ke infrastruktur yang kemungkinan berbeda secara geografis (BPS, 2019).

Masalah kemiskinan di provinsi Papua menjadi semakin kompleks dengan jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat tiap

tahunya. Jumlah penduduk bekerja di provinsi Papua pada tahun 2020 sebanyak 1,69 juta jiwa yang juga didominasi oleh laki-laki (58,44 persen). Meski begitu, peran perempuan dalam ketenaga kerjaan di provinsi Papua tidak bisa diabaikan karena perannya sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar (23,16 persen). Provinsi Papua merupakan provinsi dengan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMA terendah di Indonesia. Pada tahun 2019 APM provinsi Papua hanya sebesar 44,32 persen. Angka tersebut jauh di bawah provinsi Kalimantan Barat sebesar 59,56 persen pada tahun yang sama (BPS, 2019).

Pendidikan merupakan salah satu solusi untuk mempersiapkan individu memasuki pasar tenaga kerja, sebab dengan pendidikan, kemiskinan akan mampu teratasi dalam jangka panjang. Hal itu dapat terjadi akibat banyaknya tenaga kerja terampil yang dihasilkan melalui tahapan pendidikan yang sistemik (Achmad Dardiri, 2005). Selain itu, pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi penggurangan tingkat kemiskinan (Yetty Agustini, 2017). Ukuran tersebut menitikberatkan perhatiannya pada jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam ukuran regional.

Regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear atau yang bisa di sebut dengan istilah *Ordinary Least Square* (OLS) *Reggresion*. Perbedaanya adalah pada regresi logistik memperdiksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Sekala kotomi yang dimaksudkan adalah skala data nominal dengan data nominal dengan dua kategori, misalnya ya dan tidak, baik dan buruk atau tinggi dan rendah. Apabila pada OLS mewajibkan syarat atau asumsi bahwa Error varians (residual) berdistribusi secara normal. Sebaliknya pada regresi ini tidak dibutuhkan asumsi tersebut sebab pada regresi jenis logistik ini mengikuti distribusi logistik (Agus, 2009).

Analisis regresi logistik digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon yang berupa data berskala interval, dan atau kategorik (Hosmer dan Lemeshow, 1989). Variabel yang dikototomi/biner adalah variabel yang hanya mempunyai dua kategori

saja, yaitu kategori yang menyatakan kejadian sukses (Y = 1) dan kategori yang menyatakan kejadian gagal (Y = 0). Regresi Logistik Biner merupakan suatu teknik analisis statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan variabel respon yang bersifat biner atau dichotomous. Variabel bebas pada regresi logistik dapat berupa variabel berskala kategorik maupun variabel yang berskala kontinu sedangkan variabel respon berupa variabel berskala kategorik. Regresi logistik biner dikatakan juga salah satu pendekatan model matematis yang digunakan untuk menganalisis hubungan beberapa faktor dengan sebuah variabel yang bersifat dikotomik (biner). Artinya, dalam regresi logistik biner data pada variabel respon bersifat biner (0 dan 1). Bilangan biner tersebut menggambarkan dua kategori data yang saling bertolak belakang, seperti 'ya atau tidak', 'sukses atau gagal', dan lain.

Analisis regresi logistik biner merupakan salah satu metode yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel respon (berskala biner yaitu mempunyai dua kategori) dan variabel independennya, selain itu manfaat dari analisis ini yaitu dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan perilaku sosial.( Cahayan,E.R.S., dkk,2021)

Penelitian sebelumnya menggunakan regresi logistik seperti: faktor-faktor yang mempengaruhi status penerimaan beras keluarga miskin (RASKIN) dikecamatan Gunung Anyar dengan menggunakan regresi logistik biner, hasil penelitian ini menunujukan terdapat sepuluh variabel yang berpengaruh signifikan terhadap status penerimaan Raskin (Atika 2004). Peneliti tentang analisis regresi logistik status kemiskinan penduduk di kota Bengkulu, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi status kemiskinan penduduk kota bengkulu tahun 2004 adalah umur kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, pendidikan terakhir yang ditamatkan kepala rumah tangga, fasilitas air bersih sehingga diperoleh hasil model yang sangat baik. Penelitian yang pernah dilakuakan menggunakan metode regresi logistik biner oleh Miftahuddin (2011) adalah tentang analis krakterristik rumah tangga miskin denggan metode regresi logistik. Hasil penelitian yang di

proleh bahwa model regresi logistik biner adalah model yang terbaik. Rahaman dan Zain (2014).faktor pengaruh gadget terhadap kecerdasan motorik siswa SD, melalui regresi logistik ordinal, Octaviani,F.A.,dkk. (2014).Dampak perubahan perilaku mahasiswa dalam pemebelajaran daring oleh CRS,Cahayani.,dkk.(2021).

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitaan ini aadalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskianan di provinsi Papua tahun 2019 menggunakan analisis regresi logistik biner.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,rumusan masalah yang akan di teliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana deskriptif garis kemiskinan di provinsi Papua dan faktor-faktor yang di duga mempengaruhi?.
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi garis kemiskinan di provinsi Papua dengan menggunakan metode regresi logistik biner?.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui deskriptif garis kemiskinanan di Papua dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi, garis kemiskinan di provinsi Papua menggunakan analisis Regresi logistik biner.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pengetahuan dibidang ilmu statistika, khususnya tentang analisis regresi logistik biner pada kasus faktor-faktor yang memepengaruhi garis kemiskianan di provinsi Papua.
2. Dapat sebagai masukan bagi pemerintah provinsi Papua dalam menangani masalah kemiskinan di provinsi Papua.